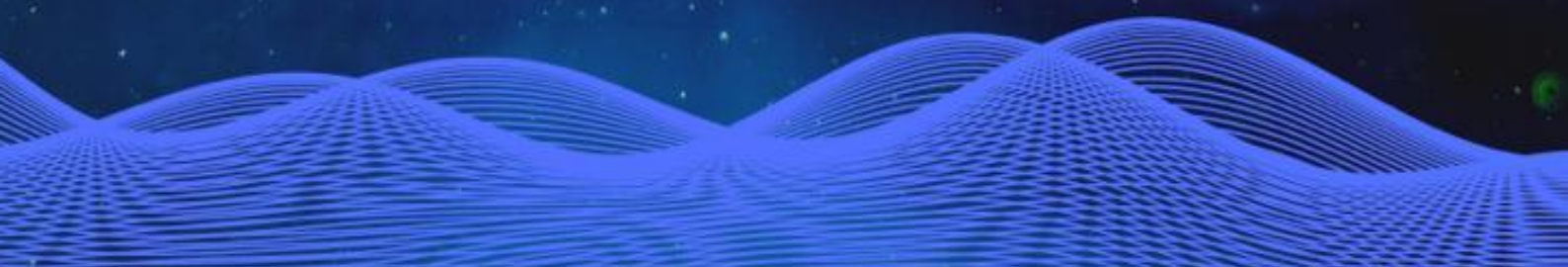




KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022



Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kami berhasil menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022. Dengan segala keterbatasan kami dapat menyelesaikan pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik sekaligus pemingkatan dan anugrah badan publik atas prestasinya dalam keterbukaan informasi publik.

Pelaksanaan evaluasi tahun ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Juli sampai Desember 2022. Seluruh tahapan monev telah dilakukan yang dimulai dari rapat koordinasi, pengiriman SAQ, pengisian SAQ, pengembalian SAQ, verifikasi, dan penilaian Visitasi/kunjungan lapangan. Penilaian visitasi menjadi metode baru dalam pelaksanaan Monev tahun 2022 untuk mengganti sesi persentasi untuk mendalami (tiga) komponen yaitu komitmen, kolaborasi dan inovasi.

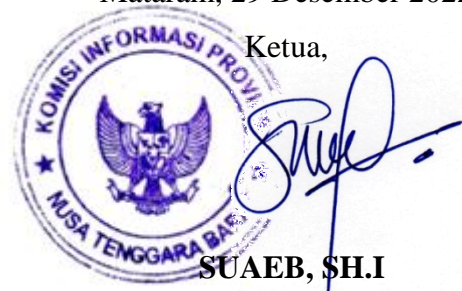
Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik. Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, kami susun dalam laporan hasil evaluasi yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, metode dan temuan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Pelaksanaan Evaluasi ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID untuk memperbaiki tehnik pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawab Badan Publik. Diharapkan ke depannya ada perbaikan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi terus menerus mengalami peningkatan Informatif setiap tahunnya. Dan adapun perbaikan dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam laporan ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur NTB Bapak DR H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., Wakil Gubernur Ibu DR. Ir. Hj Siti Rohmi Djalillah, M.Pd. Ketua DPRD Ibu Hj. Bq. Isvie Rupaida, SH.,MH., Ketua Komisi I DPRD Bapak Sirojuddin, SH. Pimpinan OPD provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pimpinan BUMD atas partisipasi dan dukungannya sehingga proses evaluasi ini berjalan lancar. Kepada tim penilai, kami menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga seluruh proses evaluasi berjalan dengan baik. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Mataram, 29 Desember 2022

Ketua,



SUAEB, SH.I

DAFTAR ISI

	HAL
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I. GAMBARAN UMUM.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tehnik dan Metode.....	2
1.3. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	4
1.4. Sasaran Kelompok Badan Publik	4
1.5. Tahapan dan Kegiatan	5
BAB II. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022	7
2.1. Kualifikasi dan Nilai Rata-Rata Keterbukaan Informasi Badan Publik	
2.1.1. Kualifikasi keterbukaan informasi publik di NTB	17
2.1.2. Nilai rata-rata tingkat keterbukaan informasi publik tahun 2022.....	21
2.2. Penilaian Indikator Pengembangan Website.....	23
2.3. Penilaian Indikator Pengumuman Informasi Publik.....	23
2.4. Penilaian Indikator Pelayanan Informasi Publik.....	24
2.5. Penilaian Indikator Penyediaan Informasi Publik.....	24
2.6. Kunjungan Lapangan (Visitasi).....	25
BAB III. PENUTUP.....	28
3.1. Kesimpulan	28
3.2. Rekomendasi.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tahapan dan kegiatan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.....	5
Tabel 2.	Daftar Badan Publik hasil pemetaan kategori PPID utama Pemerintah kabupaten/kota	7
Tabel 3.	Daftar Badan Publik hasil pemetaan kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB.....	8
Tabel 4.	Daftar Badan Publik hasil pemetaan kategori Badan Usaha Milik Daerah	9
Tabel 5.	Daftar Badan Publik Vertikal Provinsi NTB.....	10
Tabel 6.	Daftar Badan Publik Pemerintah Desa Provinsi NTB.....	11
Tabel 7.	Daftar Badan Publik KPU Kabupaten/Kota Provinsi NTB.....	12
Tabel 8.	Daftar Badan Publik yang mengembalikan SAQ sebagai unit Monev keterbukaan informasi publik tahun 2022.....	13
Tabel 9.	Daftar Badan Publik yang tidak mengembalikan SAQ.....	15
Tabel 10.	Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 kategori PPID Utama kabupaten/Kota.....	17
Tabel 11.	Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 Kategori OPD.....	18
Tabel 12.	Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 Kategori BUMD.....	19
Tabel 13.	Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 Kategori KPU Kabupaten/Kota.....	20
Tabel 14.	Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 Kategori Pemerintah Desa.....	20

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PUBLIK DI PROVINSI NTB TAHUN 2022

BAB I. GAMBARAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin Right to Information (RTI) maka diperlukan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang efektif diseluruh badan publik. Untuk menjamin hak publik terhadap akses informasi dibutuhkan kesadaran setiap badan publik atas kewajibannya untuk membuka akses terhadap setiap pemohon informasi publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Untuk menjaga efektifitas implementasi UU KIP, maka sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Huruf c menyatakan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaannya Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Untuk mengetahui sejauh mana badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik berdasarkan PerKI No 1 tahun 2021 Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Pasal 12 menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan peraturan di atas Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sasaran monev diseluruh Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi

juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, dan BUMD. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

1.2. Tehnik dan Metode



Secara Teknis tahapan dari evaluasi yang dilakukan adalah 3 tahapan yakni tahap pemetaan Badan Publik, kedua tahapan verifikasi dan ketiga tahap kunjungan lapangan (visitasi). Tahapan pemetaan Badan Publik mengamati seluruh website Badan Publik yang menjadi obyek penilaian. Tahap selanjutnya adalah pengiriman SAQ (Self Assesment Questionnaire), pengisian dan pengembalian SAQ serta verifikasi SAQ oleh Tim Penilai. Selanjutnya tim penilai melakukan visitasi yang memuat 7 unsur yaitu sarana prasarana, kualitas Informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi, strategi, digitalisasi yang disampaikan melalui persentasi dan pengamatan langsung.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

1. Tahapan Verifikasi SAQ dengan bobot nilai 80% yang terdiri dari :
 - a. Penilaian media website resmi Badan Publik dengan Bobot nilai 40% yang terdiri indikator :
 - Indikator pengembangan website 60%
 - Indikator pengumuman informasi publik 40%
 - b. Penilaian Pelayanan Informasi Publik dengan bobot 40% yang terdiri dari indikator :
 - Indikator pelayanan informasi publik 40%
 - Indikator penyediaan informasi publik 60%

2. Tahapan Penilaian video dan visitasi dengan bobot 20% dengan 7 indikator penilaian yaitu :
 - a. Sarana Prasarana;
 - b. Kualitas Informasi;
 - c. Jenis Informasi;
 - d. Komitmen Organisasi;
 - e. Inovasi;
 - f. Strategi;
 - g. Digitalisasi.

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat sebagai berikut :

1. Informatif nilai 90-100
2. Menuju Informatif nilai 80-89,9
3. Cukup Informatif nilai 60-79,9
4. Kurang Informatif nilai 40-59,9
5. Tidak Informatif nilai <39,9

1.3. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi



1. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

1.4. Sasaran Kelompok Badan Publik



Evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan terhadap Badan Publik yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan target sasaran 104 badan publik. Target sasaran monitoring dan evaluasi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB sebanyak 44 OPD, 10 PPID Utama Kabupaten/Kota dan 5 Badan Publik Milik Daerah (BUMD), 18 Lembaga Vertikal tingkat Provinsi, 10 Lembaga Vertikal tingkat Kabupaten/Kota, 16 PPID Desa.

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan kepada Badan Publik dikelompokkan menjadi 6 kategori yaitu :

1. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB sebanyak 45 OPD,
2. Kategori Instansi Vertikal Daerah Provinsi NTB sebanyak 18 Instansi Vertikal.
3. Kategori PPID Utama Kabupaten/Kota 10 Kabupaten/Kota.
4. Kategori Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota 10 Kabupaten/kota.

5. Kategori Badan Usaha Milik Daerah 5 BUMD.

6. Kategori Desa sebanyak 16 Desa.

1.5. Tahapan dan Kegiatan

Proses evaluasi dilakukan selama 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei s/d Desember 2022 dengan tahapan sebagai berikut :

Tabel 1. Tahapan dan kegiatan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

No	TahapandanKegiatan	Waktu
1	Rapat Pleno I	
	Penetapan Badan Publik Peserta Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2022	30 Mei 2022
2	Rapat Pleno II	
	a. Penetapan Badan Publik Sasaran Monev	6 Juni 2022
	b. Pembagian Tugas dan Penetapan Tim Monev	6 Juni 2022
3	Rapat Pleno III	
	Penetapan Metode dan Teknik Monev	13 Juni 2022
4	Sosialisasi MONEV KIP Dengan Badan Publik	
	Zoom Meeting Sosialisasi Visitasi	29 Juni 2022
5	Lokakarya/Sosialisasi Tatap Muka Monev 2022	6 Juli 2022
6	Pengiriman SAQ Monev ke Badan Publik	7-8 Juli 2022
7	Pengembalian SAQ Monev	9-29 Juli 2022
8	Rapat Persiapan Verifikasi SAQ	1 Agustus 2022
9	Verifikasi	
	a. Self Assessment Questionnaire (SAQ)	2 – 31 Agustus 2022
	b. Data Pendukung	2 – 31 Agustus 2022
	c. Website	2 – 31 Agustus 2022
10	Rapat Pleno IV	
	Penetapan hasil verifikasi SAQ	1 – 2 September 2022
11	Rapat Persiapan Visitasi	5 September 2022

No	TahapandanKegiatan	Waktu
12	Kunjungan Lapangan (Visitasi)	7 September – 25 November 2022
13	Pengolahan Nilai Verifikasi dan Nilai Visitasi	28 – 30 November 2022
14	Rapat Pleno V	
	Penetapan Hasil verifikasi dan Pemeringkatan BP	1 – 2 Desember 2022
15	Pengumuman Hasil Pemeringkatan BP (Anugrah KIP)	19 Desember 2022

BAB II.
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik didasarkan pada hasil pemetaan website badan publik dan diputuskan badan publik dibagi dalam 6 (enam) Kategori yaitu PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari 10 (sepuluh) PPID, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi 45 (empat puluh lima) OPD, Kategori Badan Usaha Milik Daerah sebanyak 5 (lima) BUMD, Kategori Lembaga Vertikal tingkat Provinsi 18 (delapan belas) Lembaga Vertikal Provinsi, Kategori Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota 10 Kabupaten/Kota dan Kategori Desa Provinsi NTB 16 Desa, dengan jumlah total 104 (seratus empat) badan publik.



Tabel 2. Daftar Badan Publik hasil pemetaan kategori PPID utama Pemerintah kabupaten/kota

No	Badan Publik	Ket.
1	Pemerintah Kota Mataram	
2	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	
3	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	
4	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	
5	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	
6	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	
7	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	
8	Pemerintah Kabupaten Dompu	
9	Pemerintah Kabupaten Bima	
10	Pemerintah Kota Bima	

Sumber : Data Primer, diolah 2022



Tabel 3. Daftar Badan Publik hasil pemetaan kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB.

No	Badan Publik	Ket.
1	Dinas Perindustrian	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	
5	Dinas Pariwisata	
6	Dinas Sosial	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8	Dinas Koperasi dan UKM	
9	Dinas Kesehatan	
10	Dinas Perdagangan	
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	
13	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
17	Satuan Polisi Pamong Praja	
18	Inspektorat	
19	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
23	Dinas Ketahanan Pangan	
24	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
26	Badan Kepegawaian Daerah	
27	Dinas Perhubungan	

No	Badan Publik	Ket.
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
32	Biro Perekonomian	
33	Biro Umum	
34	Biro Administrasi Pembangunan	
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
36	Biro Kesra	
37	Biro Hukum	
38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
39	Biro Administrasi Pimpinan	
40	Biro Organisasi	
41	Sekretariat DPRD	
42	Rumah Sakit Umum	
43	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	
44	Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir	
45	Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB	

Sumber : Data Primer, diolah 2022



Tabel 4. Daftar Badan Publik hasil pemetaan kategori Badan Usaha Milik Daerah.

No	Badan Publik	Ket.
1	PT. Bank NTB Syariah	
2	PT. Gerbang NTB Emas	
3	PT. Jaminan Kredit Daerah NTB Bersaing	
4	PD. Bank BPR NTB	
5	PDAM GIRI MENANG	

Sumber : Data Primer, diolah 2022



Tabel 5. Daftar Badan Publik Vertikal Provinsil NTB

No	Badan Publik	Ket.
1.	KPU Provinsi NTB	
2.	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB	
3.	PTUN Mataram	
4.	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	
5.	Kanwil Kemenkumham NTB	
6.	Kanwil DJP NTB	
7.	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	
8.	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	
9.	Pengadilan Tinggi Agama NTB	
10.	BKKBN Provinsi NTB	
11.	Pengadilan Tinggi Mataram	
12.	Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB	
13.	BAZNAS Provinsi NTB	
14.	BNN Provinsi NTB	
15.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB	
16.	Kejaksaan Tinggi NTB	
17.	Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB	
18.	BP POM Mataram	

Sumber : Data Premier, diolah 2022



Tabel 6. Daftar Badan Publik Pemerintah Desa Provinsi NTB

No	Badan Publik	Ket.
1.	Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	
2.	Desa Persak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	
3.	Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah	
4.	Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah	
5.	Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	
6.	Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	
7.	Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur	
8.	Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur	
9.	Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa	
10.	Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa	
11.	Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	

12.	Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat	
13.	Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu	
14.	Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu	
15.	Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima	
16.	Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima	

Sumber : Data Premier, diolah 2022



Tabel 7. Daftar Badan Publik KPU Kabupaten/Kota Provinsi NTB

No	BadanPublik	Ket.
1	KPU Kota Mataram	
2	KPU Lombok Barat	
3	KPU Kabupaten Lombok Utara	
4	KPU Kabupaten Lombok Tengah	
5	KPU Kabupaten Lombok Timur	
6	KPU Kabupaten Sumbawa Barat	
7	KPU Kabupaten Sumbawa	
8	KPU Kabupaten Dompu	
9	KPU Kabupaten Bima	
10	KPU Kota Bima	

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Setelah penetapan jumlah badan publik yang menjadi unit monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi melalui daring dengan seluruh badan publik. Tahap berikutnya pengiriman *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) kepada seluruh unit monev badan publik untuk dilakukan pengisian quisioner secara mandiri.

Dari 104 badan publik sasaran penilaian yang dikirimkan SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) untuk dilakukan pengisian secara mandiri. Pada tahap pengembalian SAQ terdapat 83 (delapan puluh tiga) badan publik yang melakukan pengisian dan pengembalian SAQ, sementara 21 (dua puluh satu) badan publik tidak mengembalikan SAQ kepada Komisi Informasi Provinsi NTB. Badan Publik yang mengembalikan dan tidak mengembalikan SAQ terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Daftar Badan Publik yang mengembalikan SAQ sebagai unit Monev keterbukaan informasi publik tahun 2022.

No	BadanPublik	Kategori
1	Pemerintah Kota Mataram	PPID Utama
2	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	PPID Utama
3	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	PPID Utama
4	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	PPID Utama
5	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	PPID Utama
6	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	PPID Utama
7	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	PPID Utama
8	Pemerintah Kabupaten Dompu	PPID Utama
9	Pemerintah Kabupaten Bima	PPID Utama
10	Pemerintah Kota Bima	PPID Utama
11	Dinas Perindustrian	OPD Provinsi
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Provinsi
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD Provinsi
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Provinsi
15	Dinas Pariwisata	OPD Provinsi
16	Dinas Sosial	OPD Provinsi
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Provinsi
18	Dinas Koperasi dan UKM	OPD Provinsi
19	Dinas Kesehatan	OPD Provinsi
20	Dinas Perdagangan	OPD Provinsi
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Provinsi
23	Dinas Perumahan dan Pemukiman	OPD Provinsi
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Provinsi
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OPD Provinsi
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	OPD Provinsi
27	Satuan Polisi Pamong Praja	OPD Provinsi
28	Inspektorat	OPD Provinsi
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	OPD Provinsi
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OPD Provinsi
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	OPD Provinsi

No	Badan Publik	Kategori
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPD Provinsi
33	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Provinsi
34	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	OPD Provinsi
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	OPD Provinsi
36	Badan Kepegawaian Daerah	OPD Provinsi
37	Dinas Perhubungan	OPD Provinsi
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	OPD Provinsi
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Provinsi
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OPD Provinsi
41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Provinsi
42	Biro Perekonomian	OPD Provinsi
43	Biro Umum	OPD Provinsi
44	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	OPD Provinsi
45	Biro Kesra	OPD Provinsi
46	Biro Hukum	OPD Provinsi
47	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD Provinsi
48	Biro Administrasi Pimpinan	OPD Provinsi
49	Biro Organisasi	OPD Provinsi
50	Sekretariat DPRD	OPD Provinsi
51	Rumah Sakit Umum	OPD Provinsi
52	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	OPD Provinsi
53	Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir	OPD Provinsi
54	Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB	OPD Provinsi
55	PT. Gerbang NTB Emas	BUMD
56	PT. Jaminan Kredit Daerah NTB Bersaing	BUMD
57	KPU Kabupaten Dompu	KPU Kab/Kota
58	KPU Kabupaten Lombok utara	KPU Kab/Kota
59	KPU Kota Mataram	KPU Kab/Kota
60	KPU Kabupaten Sumbawa	KPU Kab/Kota
61	KPU Kabupaten Bima	KPU Kab/Kota
62	KPU Kota Bima	KPU Kab/Kota
63	KPU Kabupaten Lombok Timur	KPU Kab/Kota
64	KPU Kabupaten Lombok Tengah	KPU Kab/Kota
65	KPU Kabupaten Sumbawa Barat	KPU Kab/Kota
66	KPU Kabupaten Lombok Barat	KPU Kab/Kota
67	Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	Pemerintah Desa

No	BadanPublik	Kategori
68	Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	Pemerintah Desa
69	Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah	Pemerintah Desa
70	Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Desa
71	Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	Pemerintah Desa
72	KPU Provinsi	Instansi Vertikal
73	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB	Instansi Vertikal
74	PTUN Mataram	Instansi Vertikal
75	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	Instansi Vertikal
76	Kanwil Kemenkumham NTB	Instansi Vertikal
77	Kanwil DJP Nusa Tenggara	Instansi Vertikal
78	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	Instansi Vertikal
79	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	Instansi Vertikal
80	Pengadilan Tinggi Agama NTB	Instansi Vertikal
81	BKKBN Provinsi NTB	Instansi Vertikal
82	Pengadilan Tinggi Mataram	Instansi Vertikal
83	Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB	Instansi Vertikal

Data Primer, diolah 2022.

Tabel 9. Daftar Badan Publik yang tidak mengembalikan SAQ.

No	BadanPublik	Kategori
1	PT. Bank NTB Syariah	BUMD
2	PD. Bank BPR NTB	BUMD
3	PDAM GIRI MENANG	BUMD
4	BAZNAS Provinsi NTB	Instansi Vertikal
5	BNN Provinsi NTB	Instansi Vertikal
6	Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB	Instansi Vertikal
7	Kejaksaan Tinggi NTB	Instansi Vertikal

8	BP POM Mataram	Instansi Vertikal
9	Kanwil Ditjen Pembendaharaan NTB	Instansi Vertikal
10	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB	OPD Prov
11	Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	Pemerintah Desa
12	Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur	Pemerintah Desa
13	Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur	Pemerintah Desa
14	Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Desa
15	Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah	Pemerintah Desa
16	Desa Labuahan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	Pemerintah Desa
17	Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat	Pemerintah Desa
18	Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu	Pemerintah Desa
19	Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu	Pemerintah Desa
20	Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima	Pemerintah Desa
21	Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima	Pemerintah Desa

Data Primer, diolah 2022.

Hasil akhir dari evaluasi ini adalah berupa nilai angka kuantitatif berdasarkan nilai indikator berdasarkan hasil verifikasi dan verifikasi faktual dalam kunjungan lapangan. Berdasarkan nilai akhir inilah akan menjadi penentu kualifikasi dan peringkat yang akan diperoleh oleh masing-masing badan publik.

2.1. Kualifikasi dan Nilai Rata-Rata Keterbukaan Informasi Badan Publik

2.1.1. Kualifikasi keterbukaan informasi publik di NTB

Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap 104 (seratus empat) badan publik unit sasaran monev didapatkan kualifikasi badan publik sebagai berikut :

- a. Badan publik Informatif sebanyak 53 badan publik
- b. Badan Publik Menuju Informatif sebanyak 15 badan publik
- c. Badan Publik Cukup Informatif sebanyak 9 badan publik
- d. Badan Publik Kurang Informatif sebanyak 4 badan publik
- e. Badan Tidak Informatif sebanyak 23 badan publik

Badan Publik kualifikasi informatif hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 tersaji pada tabel berikut ini :



Tabel 10. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 kategori PPID Utama kabupaten/Kota.

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
1	Kabupaten Lombok Barat	99,50	1	INFORMATIF	Kab/Kota
2	Kota Mataram	99,20	2	INFORMATIF	Kab/Kota
3	Kabupaten Lombok Timur	99,16	3	INFORMATIF	Kab/Kota
4	Kabupaten Lombok Tengah	97,20	4	INFORMATIF	Kab/Kota
5	Kabupaten Sumbawa	95,44	5	INFORMATIF	Kab/Kota
6	Kabupaten Lombok Utara	95,40	6	INFORMATIF	Kab/Kota
7	Kota Bima	91,32	7	INFORMATIF	Kab/Kota

Sumber : Data Primer, diolah 2022



Tabel 11. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 Kategori OPD.

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	99,40	1	INFORMATIF	OPD Prov
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	99,28	2	INFORMATIF	OPD Prov
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	98,80	3	INFORMATIF	OPD Prov
4	Inspektorat Provinsi NTB	98,44	4	INFORMATIF	OPD Prov
5	Dinas Sosial Provinsi NTB	98,40	5	INFORMATIF	OPD Prov
6	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	98,16	6	INFORMATIF	OPD Prov
7	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	97,90	7	INFORMATIF	OPD Prov
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	97,78	8	INFORMATIF	OPD Prov
9	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	97,49	9	INFORMATIF	OPD Prov
10	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	97,30	10	INFORMATIF	OPD Prov
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	97,28	11	INFORMATIF	OPD Prov
12	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	96,73	12	INFORMATIF	OPD Prov
13	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	96,52	13	INFORMATIF	OPD Prov
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	96,20	14	INFORMATIF	OPD Prov
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	95,75	15	INFORMATIF	OPD Prov
16	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	95,72	16	INFORMATIF	OPD Prov
17	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	95,63	17	INFORMATIF	OPD Prov
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	95,52	18	INFORMATIF	OPD Prov
19	Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB	95,25	19	INFORMATIF	OPD Prov
20	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB	94,12	20	INFORMATIF	OPD Prov
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	92,05	21	INFORMATIF	OPD Prov
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	91,76	22	INFORMATIF	OPD Prov
23	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB	91,21	23	INFORMATIF	OPD Prov
24	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	90,99	24	INFORMATIF	OPD Prov
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	90,92	25	INFORMATIF	OPD Prov
26	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	90,71	26	INFORMATIF	OPD Prov
27	Dinas Pertanian Provinsi NTB	90,03	27	INFORMATIF	OPD Prov
28	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	90,03	28	INFORMATIF	OPD Prov
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	90,00	29	INFORMATIF	OPD Prov

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	90,00	30	INFORMATIF	OPD Prov

Sumber : Data Primer, diolah 2022



Tabel 12. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 Kategori Badan Publik Vertikal.

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
1	KPU Provinsi NTB	99,25	1	INFORMATIF	Instansi Vertikal
2	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB	97,97	2	INFORMATIF	Instansi Vertikal
3	PTUN Mataram	96,16	3	INFORMATIF	Instansi Vertikal
4	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	94,84	4	INFORMATIF	Instansi Vertikal
5	Kanwil Kemenkumham NTB	94,76	5	INFORMATIF	Instansi Vertikal
6	Kanwil DJP Nusa Tenggara	94,68	6	INFORMATIF	Instansi Vertikal
7	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	94,00	7	INFORMATIF	Instansi Vertikal
8	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	93,15	8	INFORMATIF	Instansi Vertikal
9	Pengadilan Tinggi Agama NTB	90,85	9	INFORMATIF	Instansi Vertikal

Sumber : Data Primer, diolah, 2022



Tabel 13. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 Kategori KPU Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
1	KPU Kabupaten Dompu	97,85	1	INFORMATIF	KPU Kab/Kota
2	KPU Kabupaten Lombok Utara	97,64	2	INFORMATIF	KPU Kab/Kota
3	KPU Kota Mataram	95,88	3	INFORMATIF	KPU Kab/Kota
4	KPU Kabupaten Sumbawa	94,28	4	INFORMATIF	KPU Kab/Kota
5	KPU Kabupaten Bima	93,67	5	INFORMATIF	KPU Kab/Kota
6	KPU Kota Bima	92,48	6	INFORMATIF	KPU Kab/Kota

Sumber : Data Primer, diolah, 2022



Tabel 14. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2022 Kategori Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
	Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	94,21	1	INFORMATIF	Desa Prov

Sumber : Data Premier, diolah, 2022

Kondisi keterbukaan informasi publik tahun 2022 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil monev tahun 2021 yang terdiri dari 104 badan publik yang menjadi unit evaluasi, tingkat kualifikasi badan publik terdistribusi sebagai berikut:

- a. Badan publik kualifikasi informatif 53 badan publik (tahun 2021 ada 6 badan Publik)
- b. Badan publik kualifikasi menuju informatif 15 badan publik (tahun 2021 ada 9 badan publik)
- c. Badan publik kualifikasi cukup informatif 9 badan publik (tahun 2021 ada 15 badan publik)
- d. Badan publik kualifikasi kurang informatif 4 badan publik (tahun 2021 ada 14 badan publik)
- e. Badan publik tidak informatif 2 badan publik (tahun 2021 ada 12 badan publik)

2.1.2. Nilai rata-rata tingkat keterbukaan informasi publik tahun 2022.

Nilai rata-rata keseluruhan badan publik yang berjumlah 104 badan publik yang terdiri dari OPD Provinsi, PPID utama Kabupaten/Kota, BUMD, KPU Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa sebesar 80,45. Nilai rata-rata ini lebih baik dengan rata-rata tahun 2019 sebesar 64,78 dan tahun 2021 sebesar 74,39.

Dari nilai akhir evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik tahun 2022 terjadi kenaikan nilai rata-rata kategori badan publik sasaran monev. Nilai rata-rata monev 2022 untuk masing masing kategori sasaran monev yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah provinsi sebesar 89,77, PPID Utama Kabupaten/Kota sebesar 94,09, BUMD sebesar 61,36, Vertikal sebesar 85,49, KPU Kabupaten/Kota sebesar 90,05 dan Pemerintah Desa sebesar 61,95. Kalau dibandingkan dengan nilai rata Badan Publik OPD tahun 2021 sebesar 51,45 dan tahun 2019 sebesar 46,96. Nilai ini diperoleh dari membagi rata-rata nilai badan publik yang mengirim SAQ dan dinilai hingga akhir. Di level OPD, nilai tertinggi diperoleh oleh Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dengan nilai 99,40. Sementara Sekretariat DPRD Provinsi NTB mendapat nilai terendah dengan nilai sebesar 56,41.

Nilai rata-rata hasil monev badana publik untuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2021. Nilai rata-rata PPID Utama Kabupaten/Kota sebesar 94,09 dibandingkan dengan hasil monev 2021 sebesar 88,25 dan tahun 2019 66,26 . Nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Lombok Barat 99,50 sedangkan nilai terendah didapatkan oleh Kabupaten Dompu dengan nilai 85,92.

Sedangkan nilai rata-rata badan publik Badan Usaha Milik Daerah yang baru pertama menjadi sasaran monev adalah sebesar 61,36. Nilai tertinggi diperoleh oleh PT Jamkrida NTB Bersaing dengan nilai 80,48. Sedangkan yang terendah diperoleh oleh PT. Gerbang NTB Emas dengan nilai 39,25 Dari 5 BUMD yang menjadi target sasaran monev hanya 2 BUMD yang mengembalikan SAQ.

Nilai rata-rata badan publik Vertikal adalah sebesar 85,49. Nilai tertinggi diperoleh oleh KPU Provinsi NTB dengan nilai 99,25. Sedangkan yang mendapatkan nilai terendah diperoleh oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB dengan nilai 44,47. Dari 18 Badan Publik Vertikal yang menjadi sasaran monev hanya 12 Badan Publik Vertikal yang mengembalikan SAQ.

Untuk nilai rata-rata badan publik KPU Kabupaten/Kota yang baru pertama kali menjadi sasaran monev adalah sebesar 90,05. Nilai tertinggi diperoleh oleh KPU Kabupaten Dompu dengan nilai 97,85. Sedangkan yang mendapatkan nilai terendah diperoleh oleh KPU Kabupaten Lombok Barat dengan nilai 76,35.

Sedangkan nilai rata-rata badan publik pemerintah Desa yang juga baru pertama kali menjadi sasaran monev adalah 61,95. Nilai tertinggi diperoleh oleh Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan nilai 94,21. Sedangkan nilai mendapatkan nilai terendah diperoleh oleh Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 25,35. Dari 16 sasaran monev Pemerintah Desa hanya 5 Badan Publik Pemerintah Desa saja yang mengembalikan SAQ.

2.2.Penilaian Indikator Pengembangan Website

Penilaian pengembangan website dalam monev badan publik didasarkan pada 15 (lima belas) sub indikator pertanyaan. Dari hasil verifikasi masih terdapat badan publik yang belum memiliki Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik belum memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online. Demikian juga pada pengumuman konten keterbukaan informasi publik pada saluran media sosial tahun 2021 (laporan keuangan, rencana kerja, laporan Tahunan dll) belum tersedia.

2.3.Penilaian Indikator Pengumuman Informasi Publik

Indikator pengumuman informasi publik dalam monev 2022 didasarkan pada 16 (enam belas) sub indikator pertanyaan. Dari hasil verifikasi masih terdapat badan publik yang belum melakukan pengumuman informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik baik melalui WBS atau SP4N-LAPOR, masih ada PPID belum memiliki Struktur Organisasi Badan Publik, PPID juga tidak Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah), demikian juga dengan pengumuman Laporan Keuangan tahun 2021 dan Dokumen pelaksanaan Anggaran tahun 2022 tidak diumumkan kepada publik.

Dalam proses verifikasi tidak ditemukan jumlah permohonan informasi publik yang diterima, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Alasan penolakan permohonan informasi publik, tidak memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2021, ringkasan laporan pelayanan informasi 2020-2021 dan jumlah pemohon informasi publik yg diterima.

Masih terdapat PPID yang tidak mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2022 dan tidak menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2021 ke Komisi Informasi Provinsi NTB. Demikian juga dengan pengumuman Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2021 disampaikan kepada publik.

2.4. Penilaian Indikator Pelayanan Informasi Publik

Penilaian indikator pelayanan informasi publik didasarkan pada 12 (duabelas) sub indikator pertanyaan. Setelah dilakukan verifikasi masih terdapat badan publik yang belum memenuhi/ menyediakan anggaran secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi. Jumlah anggaran badan publik dapat dibandingkan dengan anggaran Sekretariat Daerah atau Dinas Kominfo masing-masing.

Hasil verifikasi juga menemukan tidak terdapat Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID), PPID belum melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik tahun 2022 sesuai dengan format dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PPID Badan Publik juga belum melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2021 – 2022. Belum tersedia Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online), Formulir Keberatan (offline dan/atau online; Daftar Register Permohonan offline dan/atau online, Jadwal Pelayanan Informasi Publik, Badan Publik belum memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2022.

2.5. Penilaian Indikator Penyediaan Informasi Publik.

Sub indikator pertanyaan ini berbeda-beda tergantung pada jenis badan publik. Dari hasil verifikasi tidak ditemukan SOP yang telah disahkan tentang pedoman pengelolaan keuangan PPID, tidak tersedia dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan berupa rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian / risalah rapat, tidak memiliki kebijakan sebagai standar biaya perolehan informasi publik dan pendokumentasian Informasi Publik yang disahkan.

Dari hasil verifikasi terhadap BUMD tidak menyediakan surat-surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2022-2023, PPID tidak menyediakan informasi pemegang saham dan direksi BUMD yang mengenai sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/ dewan pengawas, tidak menyediakan informasi mengenai laporan keuangan tahun 2021 yang telah diaudit.

2.6. Penilaian Kunjungan Lapangan (Visitasi)

Penilaian kunjungan lapangan (visitasi) ke seluruh PPID sasaran monev menjadi kegiatan baru dalam pelaksanaan monev tahun 2022. Penilaian ini menjadi satu paket penilaian sebagai pengganti nilai persentasi tatap muka badan publik.

Untuk kunjungan lapangan (visitasi) ke seluruh PPID badan publik, dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dimasing-masing PPID. Penilaian layanan PPID dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi.

Dari pendalaman terkait komitmen, kolaborasi dan inovasi tim penilai mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Masih adanya PPID yang belum memiliki ruang/meja pelayanan**, belum menyediakan form-form terkait pelayanan informasi dan belum menyediakan informasi prosedur pelayanan informasi publik.
- b. **Sebagian besar PPID belum membuat laporan kegiatan pelayanan informasi** yang terkait dengan jumlah pemohon yang dilayani, anggaran, sarana dan prasarana, laporan tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi dan kegiatan PPID lainnya.
- c. **Lokasi Ruang layanan tidak memudahkan akses pemohon informasi**. Beberapa PPID yang di terlihat secara kinerja bagus namun lokasi/letak ruang layanan terlalu jauh dan tidak *accessibility*. Jarang sekali ruang layanan yang berada ditempat yang strategis misalnya di dekat front office. Sekretariat PPID juga masih bercampur dengan ruang sekretariat OPD atau kantor.

- d. **Komitmen mengumumkan informasi belum optimal.** Hal ini terlihat dari minimnya konten informasi yang ditampilkan di website sejumlah badan publik.
- e. **Pengumuman informasi keuangan masih rendah.** Informasi tentang kegiatan, anggaran, dan laporan keuangan menjadi informasi publik masih minim ditampilkan di website badan publik.
- f. **Penyediaan informasi publik belum dilakukan di satu tempat.** Selama proses verifikasi, tim penilai menemukan banyak badan publik tidak menyediakan informasi khususnya di ruang pelayanan informasi.
- g. **Penyediaan informasi belum terlaksana dengan baik.** Informasi yang tersedia di PPID masih belum memadai.
- h. **Pengelolaan informasi dan dokumentasi masih dilakukan oleh staff yang bukan ahlinya.** Dalam melaksanakan tugasnya, sebagian PPID belum dibantu oleh pejabat fungsional seperti arsiparis, pranata humas, pranata komputer atau petugas yang secara khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini berdampak pada tidak tertatanya informasi di PPID secara baik. Selain itu, pemajangan, penyusunan dan pengarsipan dokumen terkesan seadanya. Hal ini tentunya akan menyulitkan PPID dalam mencari dokumen yang harus diberikan kepada pemohon informasi.
- i. **Sebagian besar pendokumentasian Informasi belum tertata dengan baik.** Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar register dokumen, pengkodean, *labeling* dan sistem katalog informasi/dokumen. Disamping itu, penyimpanan dokumen masih dilakukan secara manual dalam bentuk *hard file* sehingga membutuhkan banyak ruangan untuk menyimpannya. Sebagian besar PPID belum menerapkan konsep *papperless* dan digitalisasi dokumen.
- j. **Minimnya Konten Informasi Publik dalam Website.** Salah satu peran penting website adalah sebagai media penyampai informasi publik. Konten informasi yang disampaikan (diumumkan) melalui website ini sebagian besar masih berupa berita dan publikasi agenda rutin OPD. Misalnya, Dari 9 kategori informasi yang wajib diumumkan oleh OPD, rata-rata kurang dari 50 persen saja yang mengumumkan. Secara khusus,

informasi terkait keuangan dan laporan masih minim diumumkan diwebsite.

- k. **Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana PPID.** Salah satu kendala dalam implementasi UU KIP, khususnya dalam hal pelayanan informasi oleh PPID adalah minimnya anggaran. Terbatasnya anggaran ini mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, seperti ketersediaan ruang pelayanan, ruang tunggu, meja informasi, tempat penyimpanan dokumen/lemari arsip, dan sarana teknologi informasi. Alokasi anggaran di Badan Publik sebenarnya cukup besar, namun sebagian besarnya tidak dialokasikan untuk pengadaan sarana-prasarana dan operasional PPID.
- l. **Koordinasi antar PPID belum intensif.** Mutasi SDM bukanlah alasan yang tepat sebagai penyebab lemahnya koordinasi dan sinergi PPID dengan satuan kerja lainnya. Tetapi kenyataan bahwa lemahnya koordinasi di Internal PPID dan sinergi dengan satuan kerja lainnya menjadi kendala pelaksanaan kerja-kerja PPID banyak ditemukan. Akibatnya, jika terjadi perpindahan staff atau pimpinan yang membidangi pelayanan, maka kinerja PPID selanjutnya cenderung menurun. Belum ada upaya transisi dan pertukaran informasi antara PPID baru dengan PPID sebelumnya, juga menjadi sebab lainnya.
- m. **Pembaharuan konten informasi belum dilakukan secara rutin.** Hal ini terlihat dari masih banyaknya informasi yang belum di *upload* dan diperbaharui ke dalam website.
- n. **Tingkat pemahaman PPID terhadap UU KIP masih lemah.** Beberapa PPID belum memahami kategorisasi informasi secara baik sehingga yang seharusnya dipublikasi tidak dipublikasi, demikian juga sebaliknya.
- o. **Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi.** Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam ayat (1), dinyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan ayat (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.

BAB III. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penilaian akhir monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik di NTB tahun 2022 :
 - Untuk 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terdapat 30 OPD mendapat kualifikasi informatif, 7 OPD mendapat kualifikasi menuju informatif, 6 OPD mendapat kualifikasi cukup informatif, 1 OPD mendapat kualifikasi kurang informatif, dan 1 OPD tidak informatif.
 - Terhadap 10 PPID Utama Kabupaten/ Kota 7 PPID Utama mendapat kualifikasi informatif, 3 PPID Utama mendapatkan kualifikasi menuju informatif.
 - Terhadap 12 Instansi Vertikal terdapat 9 Instansi Vertikal mendapat kualifikasi informatif, 1 Instansi Vertikal mendapat kualifikasi cukup informatif, 2 Instansi Vertikal mendapat kualifikasi kurang informatif, 3 Instansi Vertikal mendapat kualifikasi tidak informatif.
 - Terhadap 10 KPU Kabupaten dan Kota terdapat 6 KPU Kab/Kota mendapat kualifikasi Informatif, 3 KPU Kab/Kota Menuju Informatif, 1 KPU Kab/Kota Cukup Informatif.
 - Terhadap 16 Desa Provinsi NTB terdapat 1 Desa mendapat kualifikasi informatif, 1 Desa mendapat kualifikasi menuju informatif, 1 Desa mendapat kualifikasi cukup informatif, 13 Desa mendapat kualifikasi tidak informatif.
 - Untuk 5 BUMD 1 BUMD mendapat kualifikasi Menuju Informatif, 1 BUMD kurang informatif, 3 BUMD tidak Informatif.
2. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan badan publik kualifikasi informatif dibandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 dan tahun 2019. Dengan demikian badan publik semakin patuh terhadap implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.2.Rekomendasi

1. PPID harus lebih fokus pada pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik.
2. Peningkatan komitmen PPID terutama dalam penyediaan anggaran PPID yang memadai, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik dan tersedianya tenaga/ sumber daya manusia yang cukup dalam pengelolaan PPID.
3. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi PPID baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak luar untuk membangun jaringan dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi publik.
4. Peningkatan inovasi PPID dalam pelayanan dan penyebarluasan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan sarana lainnya sehingga informasi dapat diakses dengan cara yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.
5. Peningkatan jumlah kategori dan jumlah badan publik yang menjadi unit sasaran monitoring dan evaluasi keterbukaan publik tahun 2023.

Lampiran-Lampiran

**Lampiran 1: Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik
Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2022**

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Kabupaten Lombok Barat	99.50	1	INFORMATIF
2	Kota Mataram	99.20	2	INFORMATIF
3	Kabupaten Lombok Timur	99.16	3	INFORMATIF
4	Kabupaten Lombok Tengah	97.20	4	INFORMATIF
5	Kabupaten Sumbawa	95.44	5	INFORMATIF
6	Kabupaten Lombok Utara	95.40	6	INFORMATIF
7	Kota Bima	91.32	7	INFORMATIF
8	Kabupaten Bima	89.63	8	MENUJU INFORMATIF
9	Kabupaten Sumbawa Barat	88.09	9	MENUJU INFORMATIF
10	Kabupaten Dompu	85.92	10	MENUJU INFORMATIF

**Lampiran 2 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik BUMD
Provinsi NTB Tahun 2022**

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	PT. Jamkrida NTB Bersaing	80,48		MENUJU INFORMATIF
2	Gerbang NTB Emas	39,25		KURANG INFORMATIF

**Lampiran 3 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik OPD
Provinsi NTB Tahun 2022**

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	99.40	1	INFORMATIF
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	99.28	2	INFORMATIF
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	98.80	3	INFORMATIF
4	Inspektorat Provinsi NTB	98.44	4	INFORMATIF
5	Dinas Sosial Provinsi NTB	98.40	5	INFORMATIF
6	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	98.16	6	INFORMATIF
7	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	97.90	7	INFORMATIF
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	97.78	8	INFORMATIF
9	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	97.49	9	INFORMATIF
10	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	97.30	10	INFORMATIF
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	97.28	11	INFORMATIF
12	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	96.73	12	INFORMATIF
13	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	96.52	13	INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	96.20	14	INFORMATIF
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	95.75	15	INFORMATIF
16	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	95.72	16	INFORMATIF
17	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	95.63	17	INFORMATIF
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	95.52	18	INFORMATIF
19	Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB	95.25	19	INFORMATIF
20	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB	94.12	20	INFORMATIF
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	92.05	21	INFORMATIF
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	91.76	22	INFORMATIF
23	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB	91.21	23	INFORMATIF
24	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	90.99	24	INFORMATIF
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	90.92	25	INFORMATIF
26	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	90.71	26	INFORMATIF
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	90.03	27	INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
28	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	90.03	28	INFORMATIF
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	90.00	29	INFORMATIF
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	90.00	30	INFORMATIF
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	89.15	31	MENUJU INFORMATIF
32	Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	87.28	32	MENUJU INFORMATIF
33	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	86.75	33	MENUJU INFORMATIF
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB	84.19	34	MENUJU INFORMATIF
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB	82.99	35	MENUJU INFORMATIF
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	80.48	36	MENUJU INFORMATIF
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	80.44	37	MENUJU INFORMATIF
38	Biro Kesra Setda Provinsi NTB	79.12	38	CUKUP INFORMATIF
39	Biro Umum Setda Provinsi NTB	79.12	39	CUKUP INFORMATIF
40	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB	78.40	40	CUKUP INFORMATIF
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	78.23	41	CUKUP INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
42	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	73.39	42	CUKUP INFORMATIF
43	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	64.55	43	CUKUP INFORMATIF
44	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	56.41	44	KURANG INFORMATIF

Lampiran 4 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2022.

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	KPU Kabupaten Dompu	97.85	1	INFORMATIF
2	KPU Kabupaten Lombok Utara	97.64	2	INFORMATIF
3	KPU Kota Mataram	95.88	3	INFORMATIF
4	KPU Kabupaten Sumbawa	94.28	4	INFORMATIF
5	KPU Kabupaten Bima	93.67	5	INFORMATIF
6	KPU Kota Bima	92.48	6	INFORMATIF
7	KPU Kabupaten Lombok Timur	88.00	7	MENUJU INFORMATIF
8	KPU Kabupaten Lombok Tengah	83.76	8	MENUJU INFORMATIF
9	KPU Kabupaten Sumbawa Barat	80.61	9	MENUJU INFORMATIF
10	KPU Kabupaten Lombok Barat	76.35	10	CUKUP INFORMATIF

**Lampiran 5 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik
Vertikal Provinsi NTB Tahun 2022**

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	KPU Provinsi NTB	99.25	1	INFORMATIF
2	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB	97.97	2	INFORMATIF
3	PTUN Mataram	96.16	3	INFORMATIF
4	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	94.84	4	INFORMATIF
5	Kanwil Kemenkumham NTB	94.76	5	INFORMATIF
6	Kanwil DJP Nusa Tenggara	94.68	6	INFORMATIF
7	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	94.00	7	INFORMATIF
8	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	93.15	8	INFORMATIF
9	Pengadilan Tinggi Agama NTB	90.85	9	INFORMATIF
10	BKKBN Provinsi NTB	71.27	10	CUKUP INFORMATIF
11	Pengadilan Tinggi Mataram	54.49	11	KURANG INFORMATIF
12	Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB	44.47	12	KURANG INFORMATIF

**Lampiran 6 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik
Pemerintah Desa Provinsi NTB Tahun 2022**

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	94.21	1	INFORMATIF
2	Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	88.70	2	MENUJU INFORMATIF
3	Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah	62.42	3	CUKUP INFORMATIF
4	Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa	39.09	4	TIDAK INFORMATIF
5	Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	25.35	5	TIDAK INFORMATIF

Lampiran 7 : Foto Kegiatan Monev dan Anugerah KIP NTB 2022

7.a. : Rapat Persiapan Monev KIP Tahun 2022



Tahap Verifikasi SAQ dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022



Tahap Sosialisasi Visitasi Secara Online
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



7. b. : VISITASI Monev KIP 2022 Komisi Informasi Provinsi NTB ke PPID Utama Kabupaten/Kota, PPID OPD, PPID BUMD Provinsi NTB, PPID KPU Kabupaten/Kota dan PPID Desa Provinsi NTB

Visitasi Kabupaten/Kota



Visitasi Badan Publik Kabupaten/Kota dalam Rangka Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik Kabupaten/Kota dalam Rangka Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik Kabupaten/Kota
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik Kabupaten/Kota
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik Kabupaten/Kota
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik Kabupaten/Kota
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik OPD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi BUMD



Visitasi Badan Publik BUMD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik BUMD dalam Rangka
Monitoring & Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi KPU Kabupaten/Kota



Visitasi Badan Publik KPU Kabupaten/Kota
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik KPU Kabupaten/Kota
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik KPU Kabupaten/Kota
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik KPU Kabupaten/Kota
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik KPU Kabupaten/Kota
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Desa



Visitasi Badan Publik Pemerintah Desa
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Visitasi Badan Publik Pemerintah Desa
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022





Visitasi Badan Publik Pemerintah Desa
dalam Rangka Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



7. c. : Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi NTB



Acara Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Acara Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022





Acara Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Lampiran 8 : Petunjuk Umum Pengisian SAQ



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT**

PETUNJUK UMUM

**MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NTB
TAHUN 2022**

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2021 dilakukan guna mengetahui tingkat keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

I. Alur Kegiatan

A. Pengiriman Kuisisioner

1. Tim Monev KIP NTB akan mengirimkan Kuisisioner dalam bentuk *softfile* melalui *email* dan *hardfile* melalui alamat Badan Publik. Pengiriman Kuisisioner kepada Badan Publik yang terbagi atas 6 kategori dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi : 44
 - b. Kabupaten / Kota : 10
 - c. Instansi Vertikal : 18
 - d. KPU Kabupaten/Kota : 10
 - e. BUMD : 5
 - f. Desa Model DBIP : 16
2. Pengembalian Kuisisioner dari Badan Publik kepada Tim Monev KIP NTB paling lambat tanggal 29 Juli 2022 dalam bentuk *softfile* (CD/Flasdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Email ke ki.provntb@gmail.com dengan subyek email "Monev KIP NTB 2022_(nama badan publik)"
 - b. Antar langsung atau jasa kirim ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Udayana Nomor 14 Mataram. Telp. (0370) 7507023

B. Verifikasi Kuisisioner

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2022 dalam penilaiannya menggunakan penilaian berdasarkan:

1. Indikator Pengembangan Website;
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;
3. Indikator Pelayanan Informasi Publik;
4. Indikator Penyediaan Informasi Publik.

I. Kuisisioner dengan Indikator Pengembangan Website dan Indikator Pengumuman Informasi Publik akan dilakukan verifikasi oleh Tim Monev KIP NTB kepada seluruh Badan Publik melalui Website resmi Badan Publik.

II. Kuisisioner dengan Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik akan diverifikasi oleh Tim Monev KIP NTB terhadap Badan Publik yang mengembalikan Kuisisioner yang disertai dengan data dukung. Verifikasi dilakukan melalui :

- a. Situs/portal/laman/menu/direktori yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” Kuisisioner; dan
- b. Data dukung berupa dokumen *Soft file* dalam format PDF (dokumen utuh)/ alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan Kuisisioner.

C. Visitasi

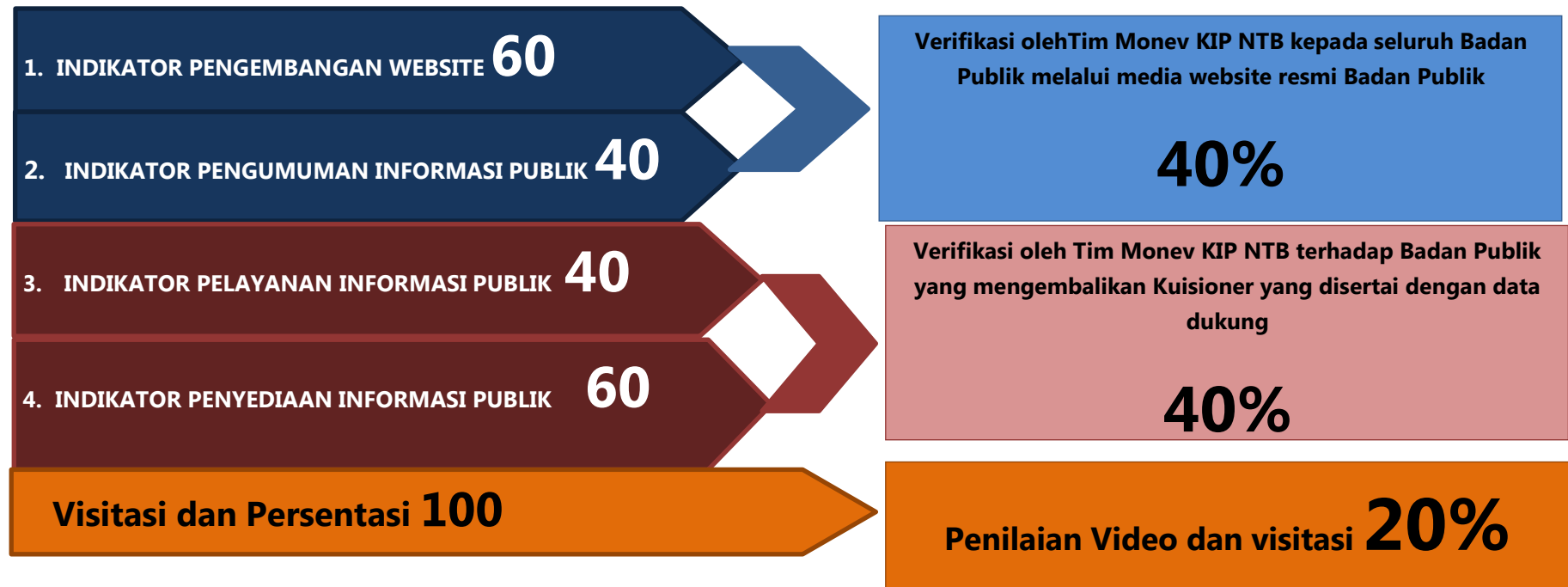
Visitasi atau Kunjungan Lapangan dan Presentasi oleh Badan Publik di Kantor Badan Publik, aspek yang dinilai terdiri atas 7 (tujuh) komponen indikator yaitu sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi; strategi; dan digitalisasi.

D. Hasil Penilaian

Hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai sebagai berikut :

1. Informatif (90-100)
2. Menuju Informatif (80-89,9)
3. Cukup Informatif (60-79,9)
4. Kurang Informatif (40-59,9)
5. Tidak Informatif (<39,9)

II. Prosentase Penilaian



III. Penganugerahan

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 akan dikategorikan menjadi 6 (enam), yaitu Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, KPU Kabupaten/Kota, BUMD, dan Desa Model DBIP. Penghargaan hanya akan diberikan kepada Badan Publik yang masuk dalam kategori Informatif.

IV. Panduan Umum Pengisian Kuisisioner

- A. Pengisian Kuisisioner dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik atau petugas yang ditunjuk oleh Atasan PPID.
- B. Responden wajib mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi melalui whatsapp/telepon.
- C. Berikan tanda "X" (silang) pada kolom "Jawaban" yang tersedia dengan memperhatikan kolom "YA/TIDAK".
- D. Jawaban pada Indikator Pengembangan Website dan Indikator Pengumuman Informasi Publik harus menyebutkan alamat/link situs/portal resmi.
- E. Jawaban Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik harus mencantumkan dan/atau melampirkan :
 1. Situs/portal yang tercantum dalam kolom "Keterangan Data Dukung" Kuisisioner ; dan
 2. Data dukung berupa dokumen *soft file* dalam format PDF (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan Kuisisioner.

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA
TENGARA BARAT**



SUAEB, S.HI

Lampiran 9 : SAQ Monev KIP NTB 2022



KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari BUMN dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A.	Aksesabilitas Website			
1	Apakah BUMD Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID*/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik ?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik tersebut terhubung dengan website resmi (utama) BUMD Sdr ?			
3	Apakah BUMD Sdr memiliki aplikasi layanan PPID berbasis <i>mobile (android, linux, apple, mobile view)</i> ?			
B.	Konten			
4	Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik BUMD Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID yang sekurang kurangnya memuat :			
a	<i>Profil Singkat tentang organisasi PPID</i>			
b	<i>Tugas dan Fungsi PPID</i>			
c	<i>Struktur Organisasi PPID</i>			
d	<i>Visi dan Misi PPID</i>			
5	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik BUMD Sdr mengumumkan Informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik ?			
6	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai:			
a	<i>Tata Cara Permohonan Informasi</i>			
b	<i>Tata Cara Pengajuan Keberatan</i>			
c	<i>Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi</i>			
7	Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik BUMD Sdr memuat Regulasi berkenaan dengan:			
a	<i>Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik</i>			
b	<i>Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik</i>			
8	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik BUMD Sdr memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara <i>online</i> ?			

9	Apakah BUMD Sdr memiliki saluran media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) yang memuat konten keterbukaan informasi publik ?			
---	--	--	--	--

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari BUMN dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Diumumkan Berkala				
10	Apakah BUMD Sdr mengumumkan Profil BUMD yang sekurang kurangnya memuat :			
	<i>a</i> Alamat kantor lengkap BUMD			
	<i>b</i> Visi Misi			
	<i>c</i> Tugas Fungsi			
	<i>d</i> Struktur Organisasi			
11	Apakah BUMD Sdr mengumumkan Profil Pimpinan BUMD ?			
12	Apakah BUMD Sdr mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya/Perusahaan (RKAB/RKAP) 2022 ?			
13	Apakah BUMD Sdr mengumumkan kalender kegiatan tahun 2022 ?			
14	Apakah BUMD Sdr mengumumkan Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2021 ?			
15	Apakah BUMD Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan BUMD ?			
16	Apakah BUMD Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat BUMD ?			
17	Apakah BUMD Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi yang memuat:			
	<i>a</i> Jumlah permohonan informasi publik yang diterima			
	<i>b</i> Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik,			
	<i>c</i> Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya			
	<i>d</i> Alasan penolakan permohonan informasi publik.			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
 2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)
 3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari BUMN dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID				
1	Apakah BUMD Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan PPID) ?			
2	Apakah BUMD Sdr memiliki struktur PPID ?			
3	Apakah BUMD Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimuktahirkan 2022 ? (format sesuai dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)			
4	Apakah BUMD Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2021 ?			
5	Apakah BUMD Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2021 ke Komisi Informasi Provinsi NTB ?			
6	Apakah BUMD Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik di BUMD Sdr ?			
7	Apakah BUMD Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik			
8	Apakah BUMD Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik berupa :			
a	<i>Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information)</i>			
b	<i>Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi</i>			
c	<i>Formulir Keberatan</i>			
d	<i>Daftar Register Permohonan</i>			
e	<i>Jadwal pelayanan informasi publik</i>			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari BUMN dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah BUMD Sdr memiliki Peraturan/Kebijakan/Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang BUMD Sdr hasilkan ?			
10	Apakah BUMD Sdr memiliki Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan ?			
11	Apakah BUMD Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi ?			
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				
12	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi ?			
13	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi ?			
14	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik ?			
15	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP ?			
16	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi ?			
17	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP pendokumentasian informasi publik ?			
18	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan ?			
Tersedia Setiap Saat				
19	Apakah BUMD Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2016 - 2020 (misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat) ?			
20	Apakah BUMD Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya ?			
21	Apakah BUMD Sdr menyediakan rencana strategis BUMD yang masih berlaku ?			
22	Apakah BUMD Sdr menyedikan SOP tentang:			
	a pedoman pengelolaan organisasi			
	b pedoman pengelolaan administrasi			
	c pedoman kepegawaian			
	d pedoman pengelolaan keuangan			
23	Apakah BUMD Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh BUMD tentang:			

a	<i>Kepegawaian</i>			
b	<i>Keuangan</i>			
24	<i>Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi mengenai pendirian dan permodalan BUMD ?</i>			
25	<i>Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi pemegang saham dan direksi BUMD yang sekurang-kurangnya mengenai:</i>			
a	<i>Pemegang saham dan direksi BUMD</i>			
b	<i>Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas</i>			
c	<i>Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi</i>			
26	<i>Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi mengenai pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran ?</i>			
27	<i>Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa ?</i>			
28	<i>Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi mengenai laporan keuangan tahun 2021 yang telah diaudit dan memuat :</i>			
a	<i>neraca laporan laba rugi</i>			
b	<i>laporan tanggung jawab sosial perusahaan</i>			
c	<i>penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan</i>			
d	<i>perubahan tahun fiskal perusahaan</i>			



Kuisisioner Monev KIP 2022Badan
Publik Desa

KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Desa dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A.	Aksesibilitas layanan Informasi			
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID /Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) (dengan menunjukkan tersedianya permohonan informasi publik pada aplikasi tersebut yang dapat diakses)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik pada saluran media sosial Tahun 2022 ? (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook)			
B.	Konten (Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr)			
6	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID			
a	<i>Profil Singkat tentang organisasi PPID (narasi singkat mengenai Keterbukaan Informasi Publik maupun PPID, kapan terbentuk, dsb)</i>			
b	<i>Tugas Fungsi PPID</i>			

c	Struktur Organisasi PPID			
d	Visi Misi PPID			
7	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik ?			
8	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai: (dalam bentuk narasi dan/atau grafis)			
a	Tata Cara Permohonan Informasi			
b	Tata Cara Pengajuan Keberatan			
c	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi			
II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK				
<p>1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK 3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung. "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>				
No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Diumumkan Berkala				
10	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik			
a	Alamat kantor lengkap (bukan alamat kantor PPID)			
b	Visi dan Misi			
c	Struktur Organisasi			
11	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Badan Publik? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan)			
12	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Dokumen APBDesa tahun 2022 ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2022 ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2021?			
15	Apakah badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2021 (yang sudah diaudit)?			
16	Apakah Badan publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik			
17	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik ?			

18	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi 2021 yang memuat :			
<i>a</i>	<i>Jumlah permohonan informasi publik yang diterima</i>			
<i>b</i>	<i>Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik</i>			
<i>c</i>	<i>Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya</i>			
<i>d</i>	<i>Alasan penolakan permohonan informasi publik</i>			

9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan :			
a	<i>Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?</i>			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID				
1	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan)?			
2	Apakah Badan Publik Sdr telah menganggarkan secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2022? (format sesuai dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2021?			
5	Apakah Badan Publik Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2021 ke Komisi Informasi ?			
6	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2021 di Badan Publik Sdr ?			
7	Apakah PPID Badan Publik Sdr telah melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2020 - 2021 ? (berupa : surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan; dan screenshot media koordinasi elektronik)			
8	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik			
a	<i>Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID) berupa foto/Video</i>			
b	<i>Formulir Permohonan Informasi (oflinedan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)</i>			
c	<i>Formulir Keberatan (oflinedan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)</i>			
d	<i>Daftar Register Permohonan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)</i>			
e	<i>Jadwal Pelayanan Informasi Publik (berupa foto/Video)</i>			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
 2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)
 3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
 "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
	Peraturan / Kebijakan / Keputusan			
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi Publik ?			
	Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik			
10	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan ?			
11	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkan ?			
12	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan ?			
	Tersedia Setiap Saat			
13	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)			
14	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan SOP yang telah disahkan tentang :			
	<i>a Pedoman pengelolaan organisasi</i>			
	<i>b Pedoman Pengelolaan administrasi</i>			
	<i>c Pedoman kepegawaian</i>			
	<i>d Pedoman pengelolaan keuangan</i>			
15	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2020 - 2022 tentang :			
	<i>a Kepegawaian</i>			
	<i>b Keuangan</i>			
16	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik Desa tahun 2021 ?			



KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A.	Aksesabilitas layanan Informasi			
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID /Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) (dengan menunjukkan tersedianya permohonan informasi publik pada aplikasi tersebut yang dapat diakses)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik pada saluran media sosial Tahun 2021 ? (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) diantaranya: a. lap.keuangan, b. rencana kerja, c. lap. Tahunan, dll.)			
B.	Konten (Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr)			
6	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID			
a	Profil Singkat tentang organisasi PPID (narasi singkat mengenai Keterbukaan Informasi Publik maupun PPID, kapan terbentuk, dsb)			
b	Tugas Fungsi PPID			
c	Struktur Organisasi PPID			
d	Visi Misi PPID			
7	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik ?			
8	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai: (dalam bentuk narasi dan/atau grafis)			
a	Tata Cara Permohonan Informasi			
b	Tata Cara Pengajuan Keberatan			
c	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi			
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan :			
a	Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?			

b	Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang Badan Publik Saudara hasilkan ? (apabila dalam tahun berjalan tidak terdapat Rancangan, mohon diberikan keterangan)			
---	--	--	--	--

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
 2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
 3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau sofffile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau sofffile sebagai data dukung yang dilampirkan
Diumumkan Berkala				
10	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik			
	<i>a Alamat kantor lengkap (bukan alamat kantor PPID)</i>			
	<i>b Visi dan Misi</i>			
	<i>c Struktur Organisasi</i>			
11	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Badan Publik? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan)			
12	Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah)			
13	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan APBD tahun 2022 ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2022 ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2021?			
16	Apakah badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2021 (audited) ? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).			
17	Apakah Badan publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik tahun 2019 - 2021?			
18	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik ? (WBS atau SP4N-LAPOR)			
19	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi 2020-2021 yang memuat :			
	<i>a Jumlah permohonan informasi publik yang diterima</i>			
	<i>b Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik</i>			
	<i>c Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya</i>			
	<i>d Alasan penolakan permohonan informasi publik</i>			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TDAK)
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID				
1	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan)?			
2	Apakah Badan Publik Sdr telah menganggarkan secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi? Bandingkan anggaran pengelolaan informasi pada badan publik dengan anggaran Sekretariat Daerah atau Dinas Kominfo Saudara (Melampirkan Screenshot/bukti mata anggaran tersebut dan persentase (%))			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2022 ? (format sesuai dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2021 ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2021 ke Komisi Informasi ?			
6	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2021 di Badan Publik Sdr ?			
7	Apakah PPID Badan Publik Sdr telah melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2020 - 2021 ? (berupa : surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan; dan screenshot media koordinasi elektronik)			
8	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik			
a	Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID) berupa foto/Video			
b	Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
c	Formulir Keberatan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
d	Daftar Register Permohonan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
e	Jadwal Pelayanan Informasi Publik (berupa foto/Video)			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Peraturan atau Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Sdr hasilkan ?			
10	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai format dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik ?			
11	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi Publik ?			
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				
12	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkan ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan ?			
16	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi yang telah disahkan ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan yang telah disahkan ?			
Tersedia Setiap Saat				
19	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2019 - 2021 (berupa : rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, dan/atau risalah rapat) ?			
20	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018 - 2020 berikut dokumen pendukungnya ? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)			
21	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan RPJMD Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih berlaku ?			
22	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan SOP yang telah disahkan tentang :			
	<i>a Pedoman pengelolaan organisasi</i>			
	<i>b Pedoman Pengelolaan administrasi</i>			
	<i>c Pedoman kepegawaian</i>			
	<i>d Pedoman pengelolaan keuangan</i>			
23	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2019 - 2021 tentang :			
	<i>a Kepegawaian</i>			
	<i>b Keuangan</i>			
24	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik Daerah tahun 2021 ?			



Kuisisioner Monev KIP 2022 Badan
Publik KPU Kabupaten/Kota

KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A. Aksesabilitas layanan Informasi				
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID /Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) (dengan menunjukkan tersedianya permohonan informasi publik pada aplikasi tersebut yang dapat diakses)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik pada saluran media sosial Tahun 2022 ? (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) diantaranya: a. lap.keuangan, b. rencana kerja, c. lap. Tahunan, dll.)			
B. Konten (Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr)				
6	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID			
a	Profil Singkat tentang organisasi PPID (narasi singkat mengenai Keterbukaan Informasi Publik maupun PPID, kapan terbentuk, dsb)			
b	Tugas Fungsi PPID			
c	Struktur Organisasi PPID			
d	Visi Misi PPID			
7	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik ?			
8	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai: (dalam bentuk narasi dan/atau grafis)			
a	Tata Cara Permohonan Informasi			
b	Tata Cara Pengajuan Keberatan			
c	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi			

9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan :		
a	Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?		
b	Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang Badan Publik Saudara hasilkan ? (apabila dalam tahun berjalan tidak terdapat Rancangan, mohon diberikan keterangan)		

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
 2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
 3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
 "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
	Diumumkan Berkala			
10	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik			
	<i>a Alamat kantor lengkap (bukan alamat kantor PPID)</i>			
	<i>b Visi dan Misi</i>			
	<i>c Struktur Organisasi</i>			
11	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Badan Publik? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan)			
12	Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Kepala Dinas/Badan/Biro, Sekretaris Dan Kepala Bidang)			
13	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2022 ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2021 ?			
16	Apakah badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2021 (audited) ? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).			
17	Apakah Badan publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik tahun 2019 - 2021?			
18	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik ? (WBS atau SP4N-LAPOR)			
19	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi 2020-2021 yang memuat :			
	<i>a Jumlah permohonan informasi publik yang diterima</i>			
	<i>b Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik</i>			
	<i>c Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya</i>			
	<i>d Alasan penolakan permohonan informasi publik</i>			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID				
1	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan)?			
2	Apakah Badan Publik Sdr telah menganggarkan secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi? Bandingkan anggaran pengelolaan informasi total Anggaran Dinas/Badan/Biro saudara (Melampirkan Screenshot/bukti mata anggaran tersebut dan persentase (%))			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2022 ? (format sesuai dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2021 ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2021 ke Komisi Informasi ?			
6	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2021 di Badan Publik Sdr ?			
7	Apakah PPID Badan Publik Sdr telah melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2020 - 2021 ? (berupa : surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan; dan screenshot media koordinasi elektronik)			
8	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik			
a	Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID) berupa foto/Video			
b	Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
c	Formulir Keberatan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
d	Daftar Register Permohonan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
e	Jadwal Pelayanan Informasi Publik (berupa foto/Video)			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
 2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)
 3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
 "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Peraturan atau Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Sdr hasilkan ?			
10	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai format dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik ?			
11	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi Publik ?			
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				
12	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkan ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan ?			
16	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi yang telah disahkan ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan yang telah disahkan ?			
Tersedia Setiap Saat				
19	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2019 - 2021 (berupa : rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, dan/atau risalah rapat) ?			
20	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019 - 2021 berikut dokumen pendukungnya ? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)			
21	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Renstra OPD (Dinas/Badan/Biro) yang masih berlaku ?			
22	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan SOP yang telah disahkan tentang :			
	a Pedoman pengelolaan organisasi			
	b Pedoman Pengelolaan administrasi			
	c Pedoman kepegawaian			
	d Pedoman pengelolaan keuangan			
23	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2019 - 2021 tentang :			
	a Kepegawaian			
	b Keuangan			
24	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik Daerah tahun 2021 ?			



Kuisisioner Monev KIP 2022 Badan
Publik KPU Kabupaten/Kota

KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

4. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

5. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK

6. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A. Aksesabilitas layanan Informasi				
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID /Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) (dengan menunjukkan tersedianya permohonan informasi publik pada aplikasi tersebut yang dapat diakses)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik pada saluran media sosial Tahun 2022 ? (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) diantaranya: a. lap.keuangan, b. rencana kerja, c. lap. Tahunan, dll.)			
B. Konten (Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr)				
6	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID			
a	Profil Singkat tentang organisasi PPID (narasi singkat mengenai Keterbukaan Informasi Publik maupun PPID, kapan terbentuk, dsb)			
b	Tugas Fungsi PPID			
c	Struktur Organisasi PPID			
d	Visi Misi PPID			
7	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik ?			
8	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai: (dalam bentuk narasi dan/atau grafis)			
a	Tata Cara Permohonan Informasi			
b	Tata Cara Pengajuan Keberatan			
c	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi			

9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan :			
a	<i>Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?</i>			
b	<i>Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang Badan Publik Saudara hasilkan ? (apabila dalam tahun berjalan tidak terdapat Rancangan, mohon diberikan keterangan)</i>			

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

4. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

5. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK

6. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
	Diumumkan Berkala			
10	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik			
	<i>a Alamat kantor lengkap (bukan alamat kantor PPID)</i>			
	<i>b Visi dan Misi</i>			
	<i>c Struktur Organisasi</i>			
11	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Badan Publik? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan)			
12	Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Kepala Dinas/Badan/Biro, Sekretaris Dan Kepala Bidang)			
13	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2022 ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2021 ?			
16	Apakah badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2021 (audited) ? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).			
17	Apakah Badan publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik tahun 2019 - 2021?			
18	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik ? (WBS atau SP4N-LAPOR)			
19	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi 2020-2021 yang memuat :			
	<i>a Jumlah permohonan informasi publik yang diterima</i>			
	<i>b Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik</i>			
	<i>c Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya</i>			
	<i>d Alasan penolakan permohonan informasi publik</i>			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

4. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

5. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TDAK)

6. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID				
1	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan)?			
2	Apakah Badan Publik Sdr telah menganggarkan secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi? Bandingkan anggaran pengelolaan informasi total Anggaran Dinas/Badan/Biro saudara (Melampirkan Screenshot/bukti mata anggaran tersebut dan persentase (%))			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2022 ? (format sesuai dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2021 ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2021 ke Komisi Informasi ?			
6	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2021 di Badan Publik Sdr ?			
7	Apakah PPID Badan Publik Sdr telah melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2020 - 2021 ? (berupa : surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan; dan screenshot media koordinasi elektronik)			
8	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik			
a	Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID) berupa foto/Video			
b	Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
c	Formulir Keberatan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
d	Daftar Register Permohonan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
e	Jadwal Pelayanan Informasi Publik (berupa foto/Video)			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

4. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

5. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)

6. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Peraturan atau Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Sdr hasilkan ?			
10	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai format dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik ?			
11	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi Publik ?			
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				
12	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkan ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan ?			
16	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi yang telah disahkan ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan yang telah disahkan ?			
Tersedia Setiap Saat				
19	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2019 - 2021 (berupa : rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, dan/atau risalah rapat) ?			
20	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019 - 2021 berikut dokumen pendukungnya ? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)			
21	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Renstra OPD (Dinas/Badan/Biro) yang masih berlaku ?			
22	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan SOP yang telah disahkan tentang :			
	a <i>Pedoman pengelolaan organisasi</i>			
	b <i>Pedoman Pengelolaan administrasi</i>			
	c <i>Pedoman kepegawaian</i>			
	d <i>Pedoman pengelolaan keuangan</i>			
23	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2019 - 2021 tentang :			
	a <i>Kepegawaian</i>			
	b <i>Kuangan</i>			
24	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik Daerah tahun 2021 ?			



Kuisisioner Monev KIP 2022

Badan Publik Instansi Vertikal

KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A.	Aksesabilitas layanan Informasi			
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID /Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) (dengan menunjukkan tersedianya permohonan informasi publik pada aplikasi tersebut yang dapat diakses)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik pada saluran media sosial Tahun 2021 ? (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) diantaranya: a. lap.keuangan, b. rencana kerja, c. lap. Tahunan, dll.)			
B.	Konten (Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr)			
6	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID			
a	<i>Profil Singkat tentang organisasi PPID (narasi singkat mengenai Keterbukaan Informasi Publik maupun PPID, kapan terbentuk, dsb)</i>			
b	<i>Tugas Fungsi PPID</i>			
c	<i>Struktur Organisasi PPID</i>			
d	<i>Visi Misi PPID</i>			
7	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik ?			

8	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai: (dalam bentuk narasi dan/atau grafis)			
a	<i>Tata Cara Permohonan Informasi</i>			
b	<i>Tata Cara Pengajuan Keberatan</i>			
c	<i>Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi</i>			

9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan :			
a	Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?			
b	Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang Badan Publik Saudara hasilkan ? (apabila dalam tahun berjalan tidak terdapat Rancangan, mohon diberikan keterangan)			

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
	Diumumkan Berkala			
10	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik			
a	Alamat kantor lengkap (bukan alamat kantor PPID)			
b	Visi dan Misi			
c	Struktur Organisasi			
11	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Badan Publik? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan)			
12	Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan APBN tahun 2022 ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2022 ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2021?			
16	Apakah badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2021 (audited) ? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).			
17	Apakah Badan publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik tahun 2019 - 2021?			
18	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik ? (WBS atau SP4N-LAPOR)			
19	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi 2020-2021 yang memuat :			
a	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima			
b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik			
c	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya			
d	Alasan penolakan permohonan informasi publik			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID				
1	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan)?			
2	Apakah Badan Publik Sdr telah menganggarkan secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi? Bandingkan anggaran pengelolaan informasi pada badan publik dengan anggaran Sekretariat Daerah atau Dinas Kominfo Saudara (Melampirkan Screenshot/bukti mata anggaran tersebut dan persentase (%))			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2022 ? (format sesuai dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2021 ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2021 ke Komisi Informasi ?			
6	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2021 di Badan Publik Sdr ?			
7	Apakah PPID Badan Publik Sdr telah melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2020 - 2021 ? (berupa : surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan; dan screenshot media koordinasi elektronik)			
8	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik			
a	<i>Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID) berupa foto/Video</i>			
b	<i>Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)</i>			
c	<i>Formulir Keberatan (offline dan/atau online; berupa foto/Video,, printscreen, link, dan/atau soft file)</i>			
d	<i>Daftar Register Permohonan (offline dan/atau online; berupa foto/Video,, printscreen, link, dan/atau soft file)</i>			
e	<i>Jadwal Pelayanan Informasi Publik (berupa foto/Video)</i>			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

- 1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai**
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Peraturan atau Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Sdr hasilkan ?			
10	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai format dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik ?			
11	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi Publik ?			
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				
12	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkan ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan ?			
16	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi yang telah disahkan ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan yang telah disahkan ?			
Tersedia Setiap Saat				
19	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2019 - 2021 (berupa : rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, dan/atau risalah rapat) ?			
20	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019 - 2021 berikut dokumen pendukungnya ? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)			
21	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Rencana Starategis yang masih berlaku ?			
22	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan SOP yang telah disahkan tentang :			
a	<i>Pedoman pengelolaan organisasi</i>			
b	<i>Pedoman Pengelolaan administrasi</i>			
c	<i>Pedoman kepegawaian</i>			
d	<i>Pedoman pengelolaan keuangan</i>			
23	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2019 - 2021 tentang :			
a	<i>Kepegawaian</i>			
b	<i>Keuangan</i>			
24	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik Negara tahun 2021 ?			

Lampiran 10 : Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Monev KIP NTB 2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BERITA ACARA PLENO

Nomor : 01/KI-NTB/VII/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat** telah diadakan **Rapat Pleno** Penetapan Badan Publik Peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Rapat Pleno menghasilkan hal sebagai berikut :

1. Penetapan Badan Publik Peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 (terlampir).

Demikian Berita Acara Pleno ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suaeb, S.HI.	Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
2	Badrun, AM.	Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
3	Drs. M. Zaini	Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
4	Sansuri, S.Pt., MM.	Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5	Asraruddin, S.AP.	Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	

LAMPIRAN : BERITA ACARA RAPAT PLENO

Penetapan Badan Publik Peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Nomor : 01/KI-NTB/VII/2022

Tanggal : 6 Juli 2022

**BADAN PUBLIK PESERTA MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022**

1. BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK
1	Pemerintah Kota Mataram
2	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
3	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
4	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
5	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
6	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
7	Pemerintah Kabupaten Sumbawa
8	Pemerintah Kabupaten Dompu
9	Pemerintah Kabupaten Bima
10	Pemerintah Kota Bima

2. BADAN PUBLIK KPU KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK
1	KPU Kota Mataram
2	KPU Kabupaten Lombok Barat
3	KPU Kabupaten Lombok Tengah
4	KPU Kabupaten Lombok Utara
5	KPU Kabupaten Lombok Timur
6	KPU Kabupaten Sumbawa Barat
7	KPU Kabupaten Sumbawa
8	KPU Kabupaten Dompu
9	KPU Kabupaten Bima
10	KPU Kota Bima

3. BADAN PUBLIK INSTANSI VERTIKAL PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK
1	KPU Provinsi NTB
2	PTUN Mataram

3	Perwakilan BPKP Provinsi NTB
4	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB
5	Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB
6	Ketua BAZNAS Provinsi NTB
7	Kanwil DJP Nusa Tenggara
8	Kanwil Kemenkumham NTB
9	BP POM Mataram
10	BKKBN Provinsi NTB
11	BNN Provinsi NTB
12	Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB
13	Pengadilan Tinggi NTB
14	Kejaksaan Tinggi NTB
15	Pengadilan Tinggi Agama NTB
16	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB
17	Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB
18	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

4. BADAN PUBLIK OPD PEMERINTAH PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK
1	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
5	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
6	Dinas Sosial Provinsi NTB
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
8	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB
9	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
10	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
12	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB
13	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
17	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB
18	Inspektorat Provinsi NTB
19	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB
23	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
24	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB
26	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB
27	Dinas Perhubungan Provinsi NTB
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB
32	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB
33	Biro Umum Setda Provinsi NTB
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB
35	Biro Kesra Setda Provinsi NTB
36	Biro Hukum Setda Provinsi NTB
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB
38	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB
39	Biro Organisasi Setda Provinsi NTB
40	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB
41	Sekretariat DPRD Provinsi NTB
42	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
43	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB
44	Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB
45	Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB

5. BADAN PUBLIK BUMD

NO	BADAN PUBLIK
1	PT. Bank NTB Syariah
2	PT. Gerbang NTB Emas
3	PT. Jaminan Kredit Daerah NTB Bersaing
4	PD. Bank BPR NTB
5	PDAM Giri Menang

6. BADAN PUBLIK PEMERINTAH DESA

NO	BADAN PUBLIK
1	Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Kabupaten Lombok Barat
2	Desa Peresak, Kec. Narmada, Kabupaten Lombok Barat
3	Desa Barabali, Kec. Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
4	Desa Montong Gamang, Kec. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
5	Desa Gondang, Kec. Gangga, Kabupaten Lombok Utara
6	Desa Sigar Penjalin, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
7	Desa Kumbang, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
8	Desa Rarang Selatan, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur
9	Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kabupaten Sumbawa
10	Desa Juranalas, Kec. Alas, Kabupaten Sumbawa
11	Desa Labuhan Lalar, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
12	Desa Sapugara Bree, Kec. Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat
13	Desa Matua, Kec. Woja, Kabupaten Dompu
14	Desa Kadindi, Kec. Pekat, Kabupaten Dompu
15	Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima
16	Desa Panda, Kec. Palibelo, Kabupaten Bima

MATARAM, 6 JULI 2022

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,**

SUAEB, S.HI.



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BERITA ACARA PLENO

Nomor : 02/KI-NTB/XI/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat** telah diadakan **Rapat Pleno** Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Rapat Pleno menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

2. Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 pada masing-masing kategori (terlampir).
3. Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 terhadap badan publik dengan kualifikasi Informatif pada masing-masing kategori (terlampir).

Demikian Berita Acara Pleno ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suaeb, S.HI.	Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
2	Badrun, AM.	Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
3	Drs. M. Zaini	Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
4	Sansuri, S.Pt., MM.	Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5	Asraruddin, S.AP.	Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	

LAMPIRAN : BERITA ACARA RAPAT PLENO

Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Nomor : 02/KI-NTB/XI/2022

Tanggal : 28 November 2022

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022**

1. KATEGORI BADAN PUBLIK VERTIKAL PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	KPU Provinsi NTB	99.25	1	INFORMATIF
2	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB	97.97	2	INFORMATIF
3	PTUN Mataram	96.16	3	INFORMATIF
4	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	94.84	4	INFORMATIF
5	Kanwil Kemenkumham NTB	94.76	5	INFORMATIF
6	Kanwil DJP Nusa Tenggara	94.68	6	INFORMATIF
7	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	94.00	7	INFORMATIF
8	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	93.15	8	INFORMATIF
9	Pengadilan Tinggi Agama NTB	90.85	9	INFORMATIF
10	BKKBN Provinsi NTB	71.27	10	CUKUP INFORMATIF
11	Pengadilan Tinggi Mataram	54.49	11	KURANG INFORMATIF
12	Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB	44.47	12	KURANG INFORMATIF

2. KATEGORI BADAN PUBLIK PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	KPU Kabupaten Dompu	97.85	1	INFORMATIF
2	KPU Kabupaten Lombok Utara	97.64	2	INFORMATIF
3	KPU Kota Mataram	95.88	3	INFORMATIF
4	KPU Kabupaten Sumbawa	94.28	4	INFORMATIF
5	KPU Kabupaten Bima	93.67	5	INFORMATIF
6	KPU Kota Bima	92.48	6	INFORMATIF
7	KPU Kabupaten Lombok Timur	88.00	7	MENUJU INFORMATIF
8	KPU Kabupaten Lombok Tengah	83.76	8	MENUJU INFORMATIF
9	KPU Kabupaten Sumbawa Barat	80.61	9	MENUJU INFORMATIF
10	KPU Kabupaten Lombok Barat	76.35	10	CUKUP INFORMATIF

3. KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH DESA PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	94.21	1	INFORMATIF
2	Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	88.70	2	MENUJU INFORMATIF
3	Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah	62.42	3	CUKUP INFORMATIF
4	Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa	39.09	4	TIDAK INFORMATIF
5	Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	25.35	5	TIDAK INFORMATIF

4. KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
----	--------------	-------------	-----------	-------------

1	Kabupaten Lombok Barat	99.50	1	INFORMATIF
2	Kota Mataram	99.20	2	INFORMATIF
3	Kabupaten Lombok Timur	99.16	3	INFORMATIF
4	Kabupaten Lombok Tengah	97.20	4	INFORMATIF
5	Kabupaten Sumbawa	95.44	5	INFORMATIF
6	Kabupaten Lombok Utara	95.40	6	INFORMATIF
7	Kota Bima	91.32	7	INFORMATIF
8	Kabupaten Bima	89.63	8	MENUJU INFORMATIF
9	Kabupaten Sumbawa Barat	88.09	9	MENUJU INFORMATIF
10	Kabupaten Dompu	85.92	10	MENUJU INFORMATIF

5. KATEGORI BADAN PUBLIK OPD PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	99.40	1	INFORMATIF
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	99.28	2	INFORMATIF
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	98.80	3	INFORMATIF
4	Inspektorat Provinsi NTB	98.44	4	INFORMATIF
5	Dinas Sosial Provinsi NTB	98.40	5	INFORMATIF
6	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	98.16	6	INFORMATIF
7	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	97.90	7	INFORMATIF
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	97.78	8	INFORMATIF
9	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	97.49	9	INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
10	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	97.30	10	INFORMATIF
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	97.28	11	INFORMATIF
12	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	96.73	12	INFORMATIF
13	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	96.52	13	INFORMATIF
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	96.20	14	INFORMATIF
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	95.75	15	INFORMATIF
16	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	95.72	16	INFORMATIF
17	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	95.63	17	INFORMATIF
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	95.52	18	INFORMATIF
19	Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB	95.25	19	INFORMATIF
20	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB	94.12	20	INFORMATIF
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	92.05	21	INFORMATIF
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	91.76	22	INFORMATIF
23	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB	91.21	23	INFORMATIF
24	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	90.99	24	INFORMATIF
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	90.92	25	INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
26	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	90.71	26	INFORMATIF
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	90.03	27	INFORMATIF
28	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	90.03	28	INFORMATIF
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	90.00	29	INFORMATIF
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	90.00	30	INFORMATIF
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	89.15	31	MENUJU INFORMATIF
32	Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	87.28	32	MENUJU INFORMATIF
33	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	86.75	33	MENUJU INFORMATIF
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB	84.19	34	MENUJU INFORMATIF
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB	82.99	35	MENUJU INFORMATIF
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	80.48	36	MENUJU INFORMATIF
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	80.44	37	MENUJU INFORMATIF
38	Biro Kesra Setda Provinsi NTB	79.12	38	CUKUP INFORMATIF
39	Biro Umum Setda Provinsi NTB	79.12	39	CUKUP INFORMATIF
40	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB	78.40	40	CUKUP INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	78.23	41	CUKUP INFORMATIF
42	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	73.39	42	CUKUP INFORMATIF
43	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	64.55	43	CUKUP INFORMATIF
44	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	56.41	44	KURANG INFORMATIF

MATARAM, 28 NOVEMBER 2022

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,**

SUAEB. S.HI.

LAMPIRAN : BERITA ACARA RAPAT PLENO

Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Nomor : 02/KI-NTB/XI/2022

Tanggal : 28 November 2022

**BADAN PUBLIK KUALIFIKASI INFORMATIF
YANG MENDAPAT ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022**

1. KATEGORI BADAN PUBLIK VERTIKAL PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	KPU Provinsi NTB	99.25	1	INFORMATIF
2	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB	97.97	2	INFORMATIF
3	PTUN Mataram	96.16	3	INFORMATIF
4	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	94.84	4	INFORMATIF
5	Kanwil Kemenkumham NTB	94.76	5	INFORMATIF
6	Kanwil DJP Nusa Tenggara	94.68	6	INFORMATIF
7	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	94.00	7	INFORMATIF
8	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	93.15	8	INFORMATIF
9	Pengadilan Tinggi Agama NTB	90.85	9	INFORMATIF

2. KATEGORI BADAN PUBLIK PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	KPU Kabupaten Dompu	97.85	1	INFORMATIF
2	KPU Kabupaten Lombok Utara	97.64	2	INFORMATIF
3	KPU Kota Mataram	95.88	3	INFORMATIF
4	KPU Kabupaten Sumbawa	94.28	4	INFORMATIF
5	KPU Kabupaten Bima	93.67	5	INFORMATIF
6	KPU Kota Bima	92.48	6	INFORMATIF

3. KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH DESA PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	94.21	1	INFORMATIF

4. KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Kabupaten Lombok Barat	99.50	1	INFORMATIF
2	Kota Mataram	99.20	2	INFORMATIF
3	Kabupaten Lombok Timur	99.16	3	INFORMATIF
4	Kabupaten Lombok Tengah	97.20	4	INFORMATIF
5	Kabupaten Sumbawa	95.44	5	INFORMATIF
6	Kabupaten Lombok Utara	95.40	6	INFORMATIF
7	Kota Bima	91.32	7	INFORMATIF

5. KATEGORI BADAN PUBLIK OPD PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	99.40	1	INFORMATIF
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	99.28	2	INFORMATIF
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	98.80	3	INFORMATIF
4	Inspektorat Provinsi NTB	98.44	4	INFORMATIF
5	Dinas Sosial Provinsi NTB	98.40	5	INFORMATIF
6	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	98.16	6	INFORMATIF
7	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	97.90	7	INFORMATIF
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	97.78	8	INFORMATIF
9	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	97.49	9	INFORMATIF
10	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	97.30	10	INFORMATIF
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	97.28	11	INFORMATIF
12	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	96.73	12	INFORMATIF
13	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	96.52	13	INFORMATIF
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	96.20	14	INFORMATIF
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	95.75	15	INFORMATIF
16	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	95.72	16	INFORMATIF
17	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	95.63	17	INFORMATIF
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	95.52	18	INFORMATIF
19	Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB	95.25	19	INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
20	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB	94.12	20	INFORMATIF
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	92.05	21	INFORMATIF
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	91.76	22	INFORMATIF
23	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB	91.21	23	INFORMATIF
24	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	90.99	24	INFORMATIF
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	90.92	25	INFORMATIF
26	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	90.71	26	INFORMATIF
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	90.03	27	INFORMATIF
28	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	90.03	28	INFORMATIF
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	90.00	29	INFORMATIF
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	90.00	30	INFORMATIF

MATARAM, 28 NOVEMBER 2022
KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,

SUAEB, S.HI.

Lampiran 11 : SK Ketua KI NTB tentang Penetapan Hasil Monev KI NTB



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 02/KEP/KI-NTB/XII/2022

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2022

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa Tim yang dibentuk oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tahapan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bahwa hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 3. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, Nomor : 02/KI-NTB/XI/2022 tanggal 28 November 2022 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Udayana No. 14 Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini adalah Daftar Nama Badan Publik pada masing-masing Kategori yang mengikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 1 Desember 2022

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ketua,

SUAEB, S.HI.

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022
Nomor : 02/KEP/KI-NTB/XII/2022
Tanggal : 1 Desember 2022

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022**

6. KATEGORI BADAN PUBLIK VERTIKAL PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	KPU Provinsi NTB	99.25	1	INFORMATIF
2	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB	97.97	2	INFORMATIF
3	PTUN Mataram	96.16	3	INFORMATIF
4	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	94.84	4	INFORMATIF
5	Kanwil Kemenkumham NTB	94.76	5	INFORMATIF
6	Kanwil DJP Nusa Tenggara	94.68	6	INFORMATIF
7	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	94.00	7	INFORMATIF
8	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	93.15	8	INFORMATIF
9	Pengadilan Tinggi Agama NTB	90.85	9	INFORMATIF
10	BKKBN Provinsi NTB	71.27	10	CUKUP INFORMATIF
11	Pengadilan Tinggi Mataram	54.49	11	KURANG INFORMATIF
12	Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB	44.47	12	KURANG INFORMATIF

7. KATEGORI BADAN PUBLIK PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	KPU Kabupaten Dompu	97.85	1	INFORMATIF
2	KPU Kabupaten Lombok Utara	97.64	2	INFORMATIF
3	KPU Kota Mataram	95.88	3	INFORMATIF
4	KPU Kabupaten Sumbawa	94.28	4	INFORMATIF
5	KPU Kabupaten Bima	93.67	5	INFORMATIF
6	KPU Kota Bima	92.48	6	INFORMATIF
7	KPU Kabupaten Lombok Timur	88.00	7	MENUJU INFORMATIF
8	KPU Kabupaten Lombok Tengah	83.76	8	MENUJU INFORMATIF
9	KPU Kabupaten Sumbawa Barat	80.61	9	MENUJU INFORMATIF
10	KPU Kabupaten Lombok Barat	76.35	10	CUKUP INFORMATIF

8. KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH DESA PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	94.21	1	INFORMATIF
2	Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	88.70	2	MENUJU INFORMATIF
3	Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah	62.42	3	CUKUP INFORMATIF
4	Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa	39.09	4	TIDAK INFORMATIF
5	Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	25.35	5	TIDAK INFORMATIF

9. KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Kabupaten Lombok Barat	99.50	1	INFORMATIF
2	Kota Mataram	99.20	2	INFORMATIF
3	Kabupaten Lombok Timur	99.16	3	INFORMATIF
4	Kabupaten Lombok Tengah	97.20	4	INFORMATIF
5	Kabupaten Sumbawa	95.44	5	INFORMATIF
6	Kabupaten Lombok Utara	95.40	6	INFORMATIF
7	Kota Bima	91.32	7	INFORMATIF
8	Kabupaten Bima	89.63	8	MENUJU INFORMATIF
9	Kabupaten Sumbawa Barat	88.09	9	MENUJU INFORMATIF
10	Kabupaten Dompu	85.92	10	MENUJU INFORMATIF

10. KATEGORI BADAN PUBLIK OPD PROVINSI NTB

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	99.40	1	INFORMATIF
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	99.28	2	INFORMATIF
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	98.80	3	INFORMATIF
4	Inspektorat Provinsi NTB	98.44	4	INFORMATIF
5	Dinas Sosial Provinsi NTB	98.40	5	INFORMATIF
6	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	98.16	6	INFORMATIF
7	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	97.90	7	INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	97.78	8	INFORMATIF
9	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	97.49	9	INFORMATIF
10	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	97.30	10	INFORMATIF
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	97.28	11	INFORMATIF
12	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	96.73	12	INFORMATIF
13	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	96.52	13	INFORMATIF
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	96.20	14	INFORMATIF
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	95.75	15	INFORMATIF
16	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	95.72	16	INFORMATIF
17	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	95.63	17	INFORMATIF
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	95.52	18	INFORMATIF
19	Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB	95.25	19	INFORMATIF
20	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB	94.12	20	INFORMATIF
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	92.05	21	INFORMATIF
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	91.76	22	INFORMATIF
23	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB	91.21	23	INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
24	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	90.99	24	INFORMATIF
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	90.92	25	INFORMATIF
26	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	90.71	26	INFORMATIF
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	90.03	27	INFORMATIF
28	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	90.03	28	INFORMATIF
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	90.00	29	INFORMATIF
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	90.00	30	INFORMATIF
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	89.15	31	MENUJU INFORMATIF
32	Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	87.28	32	MENUJU INFORMATIF
33	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	86.75	33	MENUJU INFORMATIF
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB	84.19	34	MENUJU INFORMATIF
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB	82.99	35	MENUJU INFORMATIF
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	80.48	36	MENUJU INFORMATIF
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	80.44	37	MENUJU INFORMATIF
38	Biro Kesra Setda Provinsi NTB	79.12	38	CUKUP INFORMATIF

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
39	Biro Umum Setda Provinsi NTB	79.12	39	CUKUP INFORMATIF
40	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB	78.40	40	CUKUP INFORMATIF
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	78.23	41	CUKUP INFORMATIF
42	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	73.39	42	CUKUP INFORMATIF
43	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	64.55	43	CUKUP INFORMATIF
44	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	56.41	44	KURANG INFORMATIF

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 1 Desember 2022

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ketua,

SUAEB, S.HI.